

## **KEKALAHAN PETAHANA PADA PEMILIHAN UMUM 2019: STUDI KASUS CALON LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**Mike Dewanti<sup>1</sup>, Ridho Al-Hamdi<sup>2</sup>, David Efendi<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: mikedewanti14@gmail.com<sup>1</sup>, ridhoalhamdi@umy.ac.id<sup>2</sup>, defendi@umy.ac.id<sup>3</sup>

### **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Agus Sulistiyono sebagai calon legislatif petahana dari PKB pada Pemilu 2019 di Dapil DIY. Faktor-faktor tersebut dilihat dengan tiga indikator dimensi bentuk teori kubus kekuasaan: kekuasaan terlihat (visible power), kekuasaan tersembunyi (hidden power) dan kekuasaan tidak terlihat (invisible power). Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam proses pengumpulan data, hasil dari kegiatan wawancara menjadi sumber utama guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekalahan caleg petahana. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dari tiga indikator. Pertama, yaitu kekuasaan terlihat yang meliputi strategi kampanye yang dilakukan oleh Agus Sulistiyono dengan menggunakan jalur konstitusi partai, menyebar ke seluruh DIY dan bersinergi dengan caleg DPRD dari partai yang sama yaitu partai PKB saja. Kedua, pada indikator kekuasaan tersembunyi, dengan mendapat dukungan dari partai politik pengusung dan juga praktik politik uang. Ketiga, adanya dukungan dari tokoh agama. Dari ketiga indikator tersebut, kekuasaan terlihat dan kekuasaan tersembunyi merupakan indikator yang paling dominan menyebabkan kekalahan Agus Sulistiyono pada Pemilu 2019 di Dapil DIY.*

### **Kata Kunci:**

*Petahana, Kekuasaan Terlihat, Kekuasaan Tersembunyi, Kekuasaan Tidak Terlihat*

### **Abstract**

*This article examines the factors that led to Agus Sulistiyono's defeat in the 2019 Legislative Elections in the DIY electoral district. These factors are seen with three-dimensional indicators of the power cube theory: visible power, hidden power, and invisible power. Methodologically, this article is the result of qualitative research with a case study approach. In data collection, the results of interviews are the main source to determine the factors that influence the defeat of candidates. This finding shows that there are three indicators. First, visible power which includes the campaign strategy carried out by Agus Sulistiyono using the party constitution route spreads throughout Yogyakarta and synergizes with DPRD candidates from the same party. Second, on the hidden power indicator, by obtaining support from the supporting political parties, as well as money politics practices. Third, there is support from religious leaders. Of the three indicators, visible and hidden power is the most dominant indicator that led to the defeat of Agus Sulistiyono in the 2019 Legislative Election in the DIY Electoral District.*

**Keywords:**

*Incumbent, Visible Power, Hidden Power, Invisible Power*

**Pendahuluan**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan arena pertarungan di antara para aktor dalam sistem demokrasi. Karena menjadi sebuah pertarungan, tentunya kalah dan menang merupakan hal yang wajar. Termasuk dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dapil DIY) tahun 2019. Dengan alokasi kursi 8 orang, sementara kandidat yang mencalonkan ada sebanyak 102 calon legislatif (caleg) yang berasal dari 15 partai politik, tentunya kekalahan menjadi hal yang biasa, apalagi bagi caleg yang merupakan wajah baru di Pemilu 2019.<sup>1</sup> Dari hasil Pemilu 2019, caleg yang lolos ke Senayan dari Dapil DIY masih didominasi oleh petahana. Namun, perolehan suara pada Pemilu tersebut menunjukkan setidaknya ada 3 nama politisi petahana yang gagal menjabat kembali sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024. Politisi tersebut yakni Roy Suryo dari Partai Demokrat, Titiek Soeharto dari Partai Berkarya dan Agus Sulistiyono dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kasus Agus Sulistiyono menarik karena statusnya sebagai petahana yang telah menang selama 2 periode secara berturut-turut dikalahkan oleh pendatang baru, terlebih lagi dari partai yang sama yakni PKB. Agus Sulistiyono gagal setelah perolehan suaranya tidak bisa melampaui rekan satu partainya Sukamto sebagai wajah baru dalam Pemilu 2019.<sup>2</sup> Secara logika, sebagai petahana peluang untuk memenangkan Pemilu lebih besar daripada pendatang baru. Apalagi petahana memiliki masa reses yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk bertemu masyarakat dan mendapat dukungan kembali. Hal tersebut tentunya merupakan kesempatan yang tidak dimiliki oleh Sukamto sebagai pendatang baru pada Pemilu 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan bahwa permasalahannya adalah petahana yang dua kali berturut-turut menang seharusnya mempunyai potensi untuk kembali menang pada pertarungan politik yang ke-3 tetapi kalah oleh pendatang baru. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa

---

<sup>1</sup>KPU DIY, *Daftar Calon Tetap DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil DIY* (Yogyakarta : Komisi Pemilihan Umum DIY, 2019), h. 1–2.

<sup>2</sup>Jogja Inside, “8 politisi Jogja masuk Senayan Agus Sulistiyono tumbang” dalam *JogjaInside*, 4 Desember 2019.

saja faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan petahana Agus Sulistiyono pada Pemilu 2019 di Dapil DIY.

### Tinjauan Pustaka

Menurut Zakaria, Adelia dan Nurlela, ditinjau dari perspektif *powercube* dalam pemilihan kepala desa di Simalungun Sumatera Utara menghasilkan temuan bahwa dalam pemilihan kepala desa kekuatan tersembunyi menjadi poin penting. Hal tersebut karena tokoh masyarakat yang biasanya menjadi kekuatan tersembunyi memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa dalam kampanye.<sup>3</sup> Sementara itu, menurut Chalik terdapat 3 bentuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi kemenangan petahana terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, yaitu kekuasaan terlihat, kekuasaan tersembunyi dan kekuasaan tidak terlihat.<sup>4</sup> Sementara Abdulrahman menyebutkan beberapa alasan atas kegagalan caleg petahana pada Pemilu 2014 di Jawa Tengah, yaitu ketidakmampuan caleg petahana dalam menghadapi kompetisi internal dengan sesama caleg dalam satu partai, pragmatisme pemilih, dan penyelenggara Pemilu yang kurang profesional.<sup>5</sup>

Fadli, Bailusy, Nas dan Zulfikar lebih memperjelas saat kasus Pilkada Toraja Utara 2015, keterlibatan elit lokal cukup berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik. Elit politik lokal dalam hal ini adalah tokoh agama dan juga tokoh adat.<sup>6</sup> Kemudian menurut Chalik, dalam Pilkada di Jawa Timur, kekuasaan petahana dalam mengambil dukungan dari elit lokal lebih besar dikarenakan biasanya beberapa petahana juga berasal dari kalangan Kyai dan Santri, sehingga mempermudah akses dalam menerobos jaringan politik hingga di level basis.<sup>7</sup> Batubara dan Asrinaldi juga menyatakan bahwa sebagian besar tokoh agama sebagai kekuatan tidak terlihat dalam perspektif *powercube*, dalam hal ini Kyai sering memanfaatkan pola hubungan

---

<sup>3</sup>Zakaria, Fernanda Putra Adela & Nurlela, "Hidden Power in The Choice of Head of Village in Simalungun District in 2017" dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries* (2019), h. 73–78.

<sup>4</sup>Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>5</sup>Wahid Abdulrahman, "Kegagalan Caleg petahana dalam Pemilu DPRD Jawa Tengah 2014" dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2015), h. 110–115.

<sup>6</sup>Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas & Achmad Zulfikar, "Keterlibatan Elite Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015" dalam *Aristo*, Vol. 6, No. 2 (2018), h. 301–328.

<sup>7</sup>Abdul Chalik, "Elite Lokal yang Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur" dalam *Karsa : Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, Vol. 23, No. 2 (2015), h. 363–381.

klientelistik (termasuk dalam kekuasaan tidak terlihat) untuk mendukung salah satu calon untuk memenangkan Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.<sup>8</sup>

Nasir menyebutkan bahwa faktor sosiologis agama dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam memengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya. Selain itu, adanya peran Kyai sebagai pemimpin organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan partai tertentu cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara partai yang berafiliasi tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Kriyantono, Ramadlan dan Setiawan, media massa menjadi kekuatan tersembunyi dalam pertarungan politik pada Pilkada Jawa Timur 2015. Kepentingan elit politik dan elit lokal membumbui penyebaran informasi yang kurang baik sehingga menyebabkan turunnya kualitas tata kelola dalam pelaksanaan Pemilu.<sup>10</sup> Sementara itu, kemenangan kembali petahana pada Pemilu Kabupaten Kupang 2009 diungkapkan Boro dikarenakan adanya dukungan aspek figur kandidat dan aspek partai politik. Hal yang paling dibutuhkan adalah seorang kandidat harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemilih yang ditarget sebagai kantong kemenangan tanpa memandang unsur etnis maupun unsur agama.<sup>11</sup> Sementara keterpilihan para petahana dalam Pilkada tahun 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang diungkapkan oleh Khoiron dan Siboy didukung dari faktor modal politik/modal sosial yang positif di mata publik, keberhasilan petahana dalam pembangunan, memaksimalkan program-program Bina Desa, kegiatan *door to door* ke rumah warga, dan soliditas para kader dan relawan petahana.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Faisal Batubara & Asrinaldi, "Peran Tuan Syekh dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal" dalam *Jurnal Jispo*, Vol. 8 No. 1 (2018), h. 190–208.

<sup>9</sup>Nurlatipah Nasir, "Kyai dan Islam dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya" dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No.2 (2015), h. 26–48.

<sup>10</sup>Rachmat Kriyantono, Moh Fajar Shodiq Ramadlan & Andi Setiawan, "Hidden Advertising in Local Election Era: Reducing The Public's Right of Information and Critical Power of Media in Indonesia" dalam *International Journal of Development Research*, Vol. 05, Issue 10 (2015), h. 5830-5837.

<sup>11</sup>Veronika Ina Assan Boro, "Pemasaran Politik Legislatif Petahana dalam Memenangkan Pemilu Anggota DPRD Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 (Kajian Strategi Politik dan Bauran Produk Politik)" dalam *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (2010), h. 5-14.

<sup>12</sup>Khoiron & Ahmad Siboy, "Kemenangan Petahana (Incumbent) pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi Politik dan Marketing Politik" dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1 (2018), h. 1–10.

Kemudian terkait strategi politik, Hariyanto, Hijjang, Tahir dan Kasnawi mengungkapkan bahwa strategi yang digunakan petahana dalam mempertahankan kekuasaannya pada Pilkada Sulawesi Barat 2011, antara lain; Kampanye yang berjalan sejak petahana masih menjabat tercermin dari bagaimana cara petahana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Petahana di Sulawesi Barat relatif berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi manajemen tim kampanye yang baik adalah kuncinya.<sup>13</sup> Berbeda dengan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya, Yusra dan Darmawan menyatakan bahwa tindakan manipulasi dilakukan dalam Pilkada Labuhan Batu Selatan 2015, yang bertujuan menggagalkan calon lain sehingga kemenangan petahana lebih mudah diraih karena hanya melawan calon “boneka”. Ini terjadi karena adanya kepentingan memenangkan petahana, oleh karenanya calon lain atau pendatang baru yang potensial harus digagalkan.<sup>14</sup>

Sementara itu Hidayat, Prasetyo dan Yuwana menyebutkan bahwa kekalahan telak petahana dalam Pilkadaes di Desa Tanjung membuktikan bahwa penggunaan uang dan penguasaan lembaga negara tidak berbanding lurus dengan banyaknya suara yang diperoleh. Hal ini membuktikan bahwa masih ada hubungan patron-klien yang dapat memengaruhi pemilih di pedesaan.<sup>15</sup> Sementara itu, temuan Yuliati, Raharjo dan Siswanto dari analisis yang dilakukan pada Pemilu tingkat lokal di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan petahana dan semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan petahana.<sup>16</sup>

Faktor kemenangan koalisi sekaligus pendatang baru Suharsono-Halim dalam Pilkada Kabupaten Bantul 2015 menurut Putri dan Qodir dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya koalisi partai politik yang telah dibangun oleh partai politik pendukung dan pengusung pasangan, partisipasi politik yang meningkat dibandingkan pada Pilkada

---

<sup>13</sup>Abdul Salam Hariyanto, Pawennari Hijjang, Heri Tahir & Tahir Kasnawi, “Socialization of Politics Incumbent (Case of West Sulawesi, 2011)” dalam *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, Vol. 23, No. 5 (2018), h. 27–33.

<sup>14</sup>Amri Yusra & Ikhsan Darmawan, “Kepentingan Petahana dalam Memanipulasi Pilkada Labuan Batu Selatan 2015” dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 74–87.

<sup>15</sup>Endik Hidayat, Budi Prasetyo, & Setya Yuwana, “Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri” dalam *Jurnal Politik*, Vol 4, No. 1 (2018), h. 53–86.

<sup>16</sup>Retno Yuliati, Soemarso Slamet Raharjo, Dodik Siswanto, “Accountability and Incumbent Re-Election in Indonesian Local Government” dalam *International Research Journal of Business Studies*, Vol. 9, No. 3 (2017), h. 157–168.

2010, dan modalitas. Modalitas tersebut di antaranya modal politik, modal sosial modal budaya dan modal ekonomi.<sup>17</sup> Sementara itu, Hertanto dan Mulyaningsih menyebutkan bahwa kemenangan pendatang baru sekaligus Bupati perempuan pertama di Lampung, Chusnunia Chalim pada Pilkada Lampung Timur 2015 dipengaruhi oleh faktor latar belakang keluarga. Chusnunia Chalim merupakan keturunan dari Kyai besar salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di Lampung Timur.<sup>18</sup> Sedangkan Ratri, Amaliatulwalidain dan Isabella menyatakan bahwa kemenangan Yan Anton Ferdian sebagai pendatang baru di Pilkada Banyuasin 2013 bersumber dari kekuatan dinasti politik yang dimilikinya. Kemenangan tersebut dari kekuatan modal sosial sang ayah. Modal yang dimiliki oleh Yan Anton Ferdian berupa modal sosial sekaligus simbolik, modal politik dan modal ekonomi.<sup>19</sup>

Menurut Gunawan, Bainus dan Paskarina pada konteks Pilkada Nagan Raya 2017, strategi yang digunakan Jamin Idham dan Chalidin Oesman sebagai pendatang baru untuk melawan petahana adalah strategi ofensif. Hal ini dikarenakan pasangan Jamin Idham dan Chalidin Oesman mutlak harus melakukan strategi penawaran baru kepada khalayak pemilih di Nagan Raya dalam rangka membuat pemilih berpaling dari sebelumnya mendukung dinasti politik yang dibangun Ampon Bang beralih mendukung mereka.<sup>20</sup>

Berdasarkan kajian di atas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan teori kubus kekuasaan (*powercube theory*), faktor kemenangan petahana, faktor kegagalan petahana, dan yang terakhir yaitu faktor kemenangan pendatang baru dalam Pemilu maupun Pilkada. Maka untuk pembeda dalam penelitian kali ini yaitu di mana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas kekalahan caleg petahana terhadap caleg baru yang berasal dari satu partai yaitu PKB pada Pemilu

---

<sup>17</sup>Masdiyan Putri & Zuly Qodir, "Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015" dalam *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4, No. 1 (2017), h. 142–173.

<sup>18</sup>Hertanto & Handi Mulyaningsih, "Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada di Lampung Timur Tahun 2015" dalam *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 16, No. 2 (2017), h. 100–118.

<sup>19</sup>Indah Kartika Ratri, Amaliatulwalidain & Isabella, "Strategi Pemenangan Yan Anton Ferdian di Pilkada langsung Kabupaten Banyuasin 2013" dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 37–42.

<sup>20</sup>Gunawan, Arry Bainus & Caroline Paskarina, "Strategi Koalisi Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah" dalam *Politea : Jurnal Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), h. 51-68.

2019 di Dapil DIY dengan menggunakan pendekatan teori kubus kekuasaan. Fokus penelitian ini adalah kekalahan petahana pada Pemilu 2019 dengan studi kasus terhadap caleg PKB di Dapil DIY.

## Tinjauan Teori

### *Teori Kubus Kekuasaan*

Teori kubus kekuasaan atau *powercube theory* adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh John Gaventa. Teori ini mengambil akar dari teori yang terlebih dahulu telah digagas oleh gurunya, Steven Lukes. Berangkat dari teori Lukes, menginspirasi Gaventa untuk menciptakan teori baru yang disebut sebagai teori kubus kekuasaan atau *powercube theory*. Secara umum, teori ini dipahami sebagai kontrol seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok yang lainnya.<sup>21</sup>

Teori dari Gaventa ini menjelaskan kekuasaan yang terdiri dari tiga sisi atau dimensi, yaitu dimensi level/tingkatan, dimensi ruang dan dimensi bentuk. Dimensi tingkatan terdiri atas: lokal, nasional dan global. Dimensi ruang terdiri atas: ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenankan (*invited*), dan ruang yang diciptakan atau diklaim (*claimed/created*). Dimensi bentuk terdiri atas: bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible*), bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden*), dan bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible*).

Dari tiga dimensi teori kubus kekuasaan John Gaventa, dimensi bentuk merupakan dimensi paling relevan untuk menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan melihat dari aspek dimensi bentuk dapat menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan berperan dalam pencalonan Agus Sulistiyono pada Pemilu 2019 di Dapil DIY. Lebih dari itu dengan menggunakan dimensi bentuk dari teori kubus kekuasaan ini, dari ketiga bentuk kekuasaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bentuk kekuasaan mana yang paling berpengaruh terhadap kekalahan yang dialami Agus Sulistiyono. Dimensi bentuk ini dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut:

*Pertama*, kekuasaan terlihat (*visible power*) adalah salah satu indikator dari dimensi bentuk yang berkaitan dengan upaya atau kesempatan yang dimiliki oleh

---

<sup>21</sup>Abd. Halim, *Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube Modal dan Panggung* (Yogyakarta: LP2B, 2018).

seorang caleg untuk mendapat dukungan dari masyarakat.<sup>22</sup> Kekuasaan terlihat merupakan kekuasaan yang terlihat di ruang publik. Kekuasaan terlihat ini bisa dilihat ketika memasuki masa pemilihan atau kampanye. Para elit politik juga elit partai beramai-ramai untuk turun ke pemilih dengan menggunakan berbagai strategi kampanyenya masing-masing, memberikan arahan serta mengajak pemilih untuk terlibat dalam proses Pemilu. Aktivitas elit tersebut adalah bukti bagaimana kekuasaan terlihat dijalankan dalam momentum Pemilu.

*Kedua*, kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) adalah kekuasaan di mana institusi tertentu berkuasa untuk mempertahankan pengaruhnya dengan mengontrol siapa yang dapat mengambil keputusan dalam sebuah agenda. Apabila melihat dari definisi tersebut terdapat campur tangan dari institusi tertentu yang sedang berkuasa dan dikaitkan dengan Pemilu. Dengan demikian dukungan dari partai politik pengusung kepada caleg dan juga dukungan dari penyelenggara Pemilu merupakan beberapa contoh dari kekuasaan tersembunyi. Selain itu, politik uang juga termasuk dalam kekuasaan tersembunyi. Hal ini dikarenakan praktik politik uang adalah transaksi nyata yang berusaha disembunyikan. Menurut Zakaria, Adelia dan Nurlela, kekuatan tersembunyi menjadi poin penting. Hal tersebut karena tokoh masyarakat yang biasanya menjadi kekuatan tersembunyi memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa dalam kampanye.<sup>23</sup>

*Ketiga*, kekuasaan tidak terlihat (*invisible power*) adalah kekuasaan yang paling terdalam dan tidak terlihat, di mana kekuasaan mampu membentuk batasan-batasan proses keterlibatan secara ideologis ataupun psikologis. Dalam konteks Pemilu, melakukan upaya untuk memobilisasi tokoh agama merupakan salah satu yang termasuk dalam kekuasaan yang tidak terlihat. Nasir menyebutkan bahwa faktor sosiologis agama dalam hal ini Islam dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diyakini memberi pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Di samping itu, Kyai yang berperan sebagai pemimpin keagamaan dan juga berafiliasi dengan sebuah partai politik, akan

---

<sup>22</sup>Andi Muh. Dzul Fadli, Indrawan Tobarasi & Komeyni Rusba, "Kemenangan Petahana dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau dari Perspektif Powercube" dalam *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 14, No. 2 (2018), h. 115-139.

<sup>23</sup>Zakaria, Fernanda Putra Adela & Nurlela, *Loc.Cit.*

cenderung dapat menjaga kestabilan dalam perolehan suara partai politik yang berafiliasi dengannya.<sup>24</sup>

Tabel 1.  
*Teori Powercube Theory yang digunakan dalam Penelitian*

Variabel	Indikator	Parameter
Dimensi Bentuk <i>Powercube</i> <i>Theory</i>	<i>Visibel Power/</i> Kekuasaan Terlihat	Strategi kampanye kandidat
	<i>Hidden Power/</i> Kekuasaan Tersembunyi	Dukungan dari partai politik
		Dukungan dari penyelenggara Pemilu
	<i>Invisible Power/</i> Kekuasaan Tidak Terlihat	Politik Uang Mobilisasi Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

*Sumber: John Gaventa, 2006.*

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell dalam Kusmarni pendekatan studi kasus berfokus pada mengembangkan penjelasan dan analisis yang mendalam dari satu atau lebih kasus melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi.<sup>25</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari lapangan atau pihak-pihak terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan menggunakan data yang tersedia berupa bahan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, undang-undang, artikel, dan sebagainya yang dianggap relevan dengan topik dalam penelitian ini. Langkah-langkah analisis data yang digunakan penulis merujuk pada empat langkah, yaitu pengumpulan dan pengelolaan data, seleksi data, analisa antar variable dan verifikasi data, terakhir adalah penafsiran dan penarikan kesimpulan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Nurlatipah Nasir, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup>Yani Kusmarni, *Studi Kasus* (Yogyakarta: UGM Jurnal Edu UGM Press, 2012).

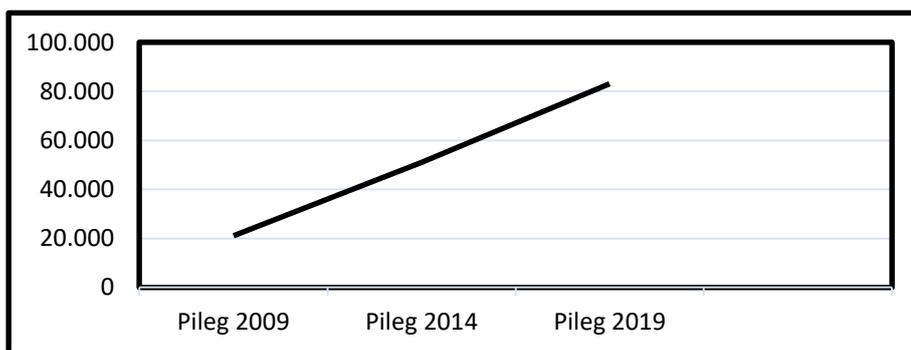
<sup>26</sup>Ridho Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Muhammad Eko Atmojo & David Efendi (ed.), *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

## Kekuasaan Terlihat

### *Strategi Kampanye*

Sebagai caleg petahana, Agus Sulistiyono tentunya sudah sangat *expert* dalam berkampanye. Hal ini terbukti dengan memenangkan Pemilu yang pernah ia ikuti sebelumnya. Sebagai seorang petahana mampu membuktikan bahwa selama menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode berturut-turut, ia menjalankan tugas dengan baik dan menampung aspirasi masyarakat. Hal tersebut terbukti dari jumlah suara yang dari Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Gambaran peningkatan perolehan suara Agus Sulistiyono sejak Pemilu 2009 digambarkan dalam grafik 1 berikut ini.

Grafik 1.  
*Perolehan Suara Agus Sulistiyono di Dapil DIY*



*Sumber: diolah oleh peneliti dari KPU RI<sup>27</sup> dan KPU DIY.<sup>28</sup>*

Jika melihat grafik di atas, dari Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019 Agus Sulistiyono mendapat perolehan suara yang terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pemilu 2009 dengan perolehan 21.000 suara, Pemilu 2014 mendapatkan sekitar 53.000 suara dan Pemilu 2019 mendapat sekitar 83.000 suara. Hal tersebut berarti Agus Sulistiyono mampu menjaga suara pemilih dan mampu meningkatkan perolehan suara. Menurutnya cara paling mudah untuk memperoleh dukungan dari

<sup>27</sup>KPU RI, *Pemilu 2009 Dalam Angka* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2010).

<sup>28</sup>KPU DIY, *Data Hasil Pemilu 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum DIY, 2014).

masyarakat adalah dengan sering mengunjungi konstituen. Itulah strategi kampanye yang dilakukan Agus Sulistiyono untuk menghadapi Pemilu 2019.<sup>29</sup>

Perolehan suara yang didapat Agus Sulistiyono pada Pemilu 2019 bisa dibilang cukup merata di Provinsi DIY. Agus Sulistiyono menang di 3 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Jadi, ia hanya mengalami kekalahan di Kabupaten Sleman. Kemenangan di 3 kabupaten dan 1 kota ini sejalan dengan strategi kampanye yang dilakukan secara merata.<sup>30</sup>

Dari hasil Pemilu 2019 yang dirilis KPU, perolehan suara yang diperoleh Agus Sulistiyono di Kabupaten Sleman sangat jauh dibandingkan caleg lawannya. Perolehan suara Agus Sulistiyono di Kabupaten Sleman yakni sebesar 15.117 suara dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 774.609. Menurut pengakuan Jumakir sebagai Tim Sukses Agus Sulistiyono, kekalahan yang dialami Agus Sulistiyono di Kabupaten Sleman memang dikarenakan fokus kampanye tidak dipusatkan di Sleman. Menurutnya untuk mampu mendapat suara di Kabupaten Sleman sangatlah berat, hal ini dikarenakan Sleman merupakan basis kuat lawan Agus Sulistiyono, yaitu Sukamto. Melihat sulitnya tantangan untuk memenangkan suara di Dapil Sleman, proses kampanye yang dilakukan Agus Sulistiyono menyebar tetapi lebih ditegaskan di wilayah-wilayah yang bukan merupakan basis kuat lawan tanpa mengurangi upaya memperoleh suara di kabupaten tersebut, dalam hal ini Kabupaten Sleman. Dengan kata lain, kampanye yang dilakukan oleh Agus Sulistiyono adalah mempertahankan basis yang sudah ada dan mencari basis di ceruk-ceruk baru.<sup>31</sup>

Sebagai gambaran pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Agus Sulistiyono, kami mengambil contoh kasus yang ada di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul, Agus Sulistiyono berusaha untuk mencari suara di 17 kecamatan, 75 desa dan sekitar kurang lebih 300 dusun yang ada. Jika dipresentasikan, dari sekitar 933 dusun yang ada di Bantul, Agus Sulistiyono melakukan kampanye di sekitar 30% jumlah dusun yang ada.

---

<sup>29</sup>Agus Sulistiyono, Caleg Petahana PKB, *wawancara*, 23 Desember 2020.

<sup>30</sup>Jumakir, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kabupaten, *wawancara*, 28 Desember 2020.

<sup>31</sup>Jumakir, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kabupaten, *wawancara*, 28 Desember 2020.

Secara spesifik, pendekatan berupa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan dengan 2 cara. *Pertama*, mendatangi undangan masyarakat. Sebagai petahana dan juga ketua DPW PKB, Agus Sulistiyono bukanlah orang baru di kalangan masyarakat. Tidak mengherankan jika kerap mendapat undangan dari masyarakat untuk menghadiri acara yang dilakukan oleh masyarakat baik di level kecamatan, desa, sampai di level dusun. Masyarakat yang mengundang Agus Sulistiyono ini merupakan basis yang sudah dibangun Agus Sulistiyono sejak Pemilu sebelumnya. Dengan menghadiri undangan dari masyarakat, mampu mempertahankan basis yang sudah pernah dibangun dan membangun kedekatan dengan masyarakat. *Kedua*, mengundang masyarakat. Agus Sulistiyono juga sering mengundang masyarakat perwakilan dari suatu wilayah untuk menghadiri pertemuan sosialisasi yang diadakan guna mendapat dukungan dari kelompok masyarakat tersebut.<sup>32</sup>

Selain itu dalam melakukan kampanye, Agus Sulistiyono juga menggunakan tim sukses dari internal PKB dan berusaha memberdayakan caleg PKB di DPRD dengan cara bersinergi dengan hampir 85% caleg dari PKB serta melakukan kampanye kolektif. Jika dipahami lebih dalam, sebenarnya model kampanye ini akan lebih efisien. Selain lebih menghemat pengeluaran untuk kampanye, bekerjasama dengan caleg lain dapat lebih menghemat waktu juga.<sup>33</sup>

Strategi kampanye yang digunakan oleh Agus Sulistiyono dengan jalur konstitusi partai ini sejalan dengan harapan PKB. Jalur konstitusi partai yang digunakan oleh Agus Sulistiyono adalah dengan bekerjasama dengan caleg-caleg yang ada di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dalam Rapat Pembekalan Calon Legislatif Pemilu 2019 yang diselenggarakan di DPW PKB Kabupaten Semarang pada 28 September 2018, mengajak seluruh caleg untuk saling bekerja sama untuk membesarkan PKB. Seluruh caleg juga diharapkan harus mampu menciptakan pertarungan yang solid, saling memberi manfaat dan juga saling berbagi tugas dalam upaya kemajuan partai. Dengan kata lain, diharapkan seluruh caleg anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mampu menciptakan asas kohesi antar caleg.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Jumakir, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kabupaten, *wawancara*, 28 Desember 2020.

<sup>33</sup>Agus Sulistiyono, Caleg Petahana PKB, *wawancara*, 23 Desember 2020.

<sup>34</sup>Solo Pos, "Cak Imin ajak Caleg PKB Perkuat Strategi" dalam *Solopos*, 2018.

Selain itu, Agus Sulistiyono juga menggunakan strategi pendekatan berbasis pendidikan dengan melakukan beberapa kunjungan ke sekolah yang berbasis Nahdlatul Ulama di antaranya SMK Ma'arif 2 Sleman. Dalam video yang diunggah oleh chanel youtube DPR RI, dalam kunjungannya ke SMK Ma'arif 2 Sleman, Agus Sulistiyono menyempatkan diri mengunjungi kelas-kelas yang ada di sekolah serta memberikan kata sambutan serta mendengarkan dan juga menampung aspirasi yang disampaikan oleh guru-guru yang mengajar di SMK Ma'arif 2 Sleman. Kepala Sekolah SMK Ma'arif 2 Sleman, Atik Sunaryati dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh youtube DPR RI menyatakan dukungannya kepada Agus Sulistiyono. Menurutnya sebagai sama-sama warga Nahdlatul Ulama, sangat mendukung Agus Sulistiyono pada Pemilu 2019 dan juga karena kedekatan Agus Sulistiyono dengan warga sekolah.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya strategi kampanye yang dilakukan oleh Agus Sulistiyono pada Pemilu 2019 yakni menggunakan jalur konstitusi partai sesuai yang diamanahkan oleh PKB yaitu bersinergi dengan seluruh caleg baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian untuk pendekatan dengan masyarakat, Agus Sulistiyono melakukan sosialisasi dengan 2 cara yaitu mendatangi undangan masyarakat dan mengundang masyarakat. Ia juga melakukan pendekatan terhadap sekolah-sekolah berbasis Nahdlatul Ulama untuk memperluas jaringan dukungan. Selain itu, salah satu upaya untuk memperoleh suara yang tinggi dilakukan Agus Sulistiyono dengan melakukan kampanye menyebar di seluruh DIY.

### **Kekuasaan Tersembunyi**

#### *Dukungan dari Partai Politik Pengusung*

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dukungan dari partai politik pengusung merupakan modal yang penting bagi caleg. Agus Sulistiyono sendiri sudah mendapat dukungan yang besar dari internal partai PKB. Agus Sulistiyono memperoleh dukungan dari Ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar.<sup>36</sup> Posisi Agus Sulistiyono sebagai Ketua DPW PKB di DIY, memberikan keuntungan yang besar dalam mendapat

---

<sup>35</sup>DPR RI, "DPR RI-suara dapil-Agus Sulistiyono" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=yS3M4LnQzUU&t=1089s> diakses 12 Februari 2019.

<sup>36</sup>Agus Sulistiyono, Caleg Petahana PKB, *wawancara*, 23 Desember 2020.

dukungan dari internal partai. Dengan posisi tersebut, ia mampu membangun kedekatan yang lebih dalam kepada para kader-kader partai.<sup>37</sup>

Untuk susunan tim sukses, Agus Sulistiyono menggunakan tim sukses yang berasal dari internal PKB. Sunyoto mengungkapkan bahwa kesetiaan terhadap partai menjadi pondasi dalam menentukan struktur susunan tim sukses.<sup>38</sup> Dukungan dari pengurus cabang maupun pengurus anak cabang sangatlah besar. Sekitar 90% dukungan mereka adalah untuk Agus Sulistiyono. Sisanya, karena Pemilu ini sudah termasuk ranah personal, PKB tidak mempunyai hak untuk memutuskan kadernya mendukung salah satu pihak.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dukungan dari PKB kepada Agus Sulistiyono sebagai caleg PKB pada Pemilu 2019 sangatlah besar. *Pertama*, dapat dilihat dari dukungan Ketua Umum PKB. *Kedua*, bisa dilihat dari dukungan caleg DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 85%. *Ketiga*, dukungan dari PC PAC Partai PKB sebanyak 90%. *Keempat*, dapat dilihat dari susunan tim sukses yang semua berasal dari internal PKB.

#### *Dukungan dari Penyelenggara Pemilu*

Pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari adanya penyelenggara Pemilu. Penyelenggara kegiatan Pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu. Sebagai penyelenggara tentunya keduanya diharapkan memiliki sikap independen dan tidak memihak kepada salah satu kandidat. KPU bukanlah anak buah siapapun, baik Presiden maupun DPR. Sehingga independensi KPU sangat terjaga.<sup>40</sup> Mantan Ketua Hakim Konstitusi, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa kinerja KPU semakin ke depan semakin bagus. Menurutnya independensi KPU sekarang jauh lebih bagus jika dibandingkan pada zaman Orde Baru. Independensi KPU ini didukung dengan adanya Bawaslu sebagai badan pengawas.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup>Sunyoto, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kecamatan, *wawancara*, 1 Januari 2021.

<sup>38</sup>Sunyoto, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kecamatan, *wawancara*, 1 Januari 2021.

<sup>39</sup>Jumakir, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kabupaten, *wawancara*, 28 Desember 2020.

<sup>40</sup>Desy Hartini, "KPU Pastikan Bersikap Independent dalam Mengurus Pemilu" dalam *Kompas*, 11 Maret 2019.

<sup>41</sup>CNN Indonesia, "Mahfud MD: KPU Sekarang Independent" dalam *CNN Indonesia*, 1 Februari 2019.

Amir Nashiruddin, Komisioner Bawaslu DIY menegaskan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu mereka bersikap independen. Menurutnya ketatnya pengawasan yang dilakukan akan semakin mempersempit peluang terjadinya kecurangan yang dilakukan dengan mendapat dukungan dari penyelenggara. Amir Nashiruddin menjelaskan bahwa pengawas dalam pelaksanaan Pemilu tidak hanya Bawaslu, namun termasuk juga masyarakat sipil sehingga akan mempersulit peluang tersebut.<sup>42</sup> Noor Aan Muhlshoh selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara pada Pemilu 2019, Agus Sulistiyono juga tidak menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak KPUD Sleman dengan tujuan untuk mendapat dukungan khusus dari KPU. Selain itu, di lapangan pada saat pelaksanaan Pemilu, juga tidak ditemukan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu untuk menguntungkan pihak Agus Sulistiyono. Dengan demikian ia memastikan tidak ada dukungan khusus dari pihak KPUD terhadap caleg Agus Sulistiyono.<sup>45</sup> Jumakir selaku Tim Sukses Agus Sulistiyono juga menyatakan bahwa tidak ada dukungan khusus dari penyelenggara kepada caleg secara mandiri. Ia menegaskan bahwa mendapat dukungan khusus dari penyelenggara sangatlah sulit. Itu juga didasari sikap independen dan netralitas yang digunakan sebagai pionir kinerja penyelenggara Pemilu.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan dukungan secara khusus dari penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu kepada Agus Sulistiyono. Hal ini dikarenakan ketatnya proses pengawasan dan sikap independen dan netralitas yang dijunjung tinggi oleh penyelenggara Pemilu.

### *Politik Uang*

Dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sebenarnya praktik politik uang atau *money politic* untuk memperoleh suara dengan cara membeli suara masyarakat bukanlah hal baru. Tidak terkecuali Pemilu 2019, menurut Agus Sulistiyono sebagai caleg petahana yang sudah beberapa kali mengikuti Pemilu menyebutkan bahwa orientasi pemilih semakin kedepan semakin berubah menjadi pemilih yang pragmatis dan transaksional. Dengan adanya perubahan sikap pemilih tersebut, memaksa para caleg

---

<sup>42</sup>Amir Nashiruddin, Komisioner Bawaslu DIY, *wawancara*, 23 Desember 2020.

<sup>45</sup>Noor Aan Muhlshoh, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Sleman, *wawancara*, 18 Februari 2021.

<sup>43</sup>Jumakir, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kabupaten, *wawancara*, 28 Desember 2020.

untuk memiliki finansial yang banyak dalam menghadapi Pemilu. Agus Sulistiyono juga menjelaskan bahwa Pemilu 2019 ia menghabiskan dana kampanye sejumlah 6 milyar yang ia gunakan untuk kampanye termasuk uang transportasi, akomodasi, konsumsi, bahkan untuk *buynome* pemilih, artinya ia mengalokasikan sebagian dana serangan fajar.<sup>44</sup>

Hal itu secara langsung menunjukkan bahwa praktik politik uang yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh pendatang baru saja, namun seorang petahana juga melakukannya guna mempertahankan perolehan suaranya. Kegiatan kampanye yang dilakukan Agus Sulistiyono juga membutuhkan alokasi dana yang cukup banyak. Bagaimana tidak, setiap mengundang masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan kampanye, Agus Sulistiyono juga memberikan akomodasi atau uang transportasi kepada para tamu undangan. Selain itu, setiap kali ke dusun-dusun untuk melakukan kampanye tidak luput dari masyarakat yang meminta sumbangan. Ia menyebutkan salah satu contoh yang terjadi di Kabupaten Bantul, beberapa daerah mengajukan berbagai macam permintaan. Namun ia juga menjelaskan bahwa tidak semua permintaan itu direalisasikan semua, sebagian ada yang direalisasikan penuh, ada yang sebagian, tetapi ada juga yang tidak direalisasikan.<sup>45</sup>

Sementara itu untuk Kecamatan Samigaluh, Sunyoto menjelaskan bahwa di wilayahnya, Agus Sulistiyono memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tani dan juga kelompok RT, termasuk pemberian ambulance kepada pondok pesantren seminggu sebelum pemilihan berlangsung. Namun, ia menuturkan bahwa pemberian bantuan dalam Pemilu sangatlah wajar dilakukan.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa sebagai seorang petahana tidak terlepas dari praktik *money politic* yang dilakukan secara terselubung. Dari beberapa data yang diperoleh selama kampanye Pemilu 2019, Agus Sulistiyono juga melakukan beberapa upaya yang termasuk dalam praktik politik uang, yang terdiri dari pemberian serangan fajar, akomodasi kampanye, bantuan ke dusun-dusun, bantuan ke kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, dan juga pemberian ambulance ke salah satu pondok pesantren.

---

<sup>44</sup>Agus Sulistiyono, Caleg Petahana Partai PKB, *wawancara*, 23 Desember 2020.

<sup>45</sup>Jumakir, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kabupaten, *wawancara*, 28 Januari 2021.

<sup>46</sup>Sunyoto, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kecamatan, *wawancara*, 1 Januari 2021.

## **Kekuasaan Tidak Terlihat**

### *Mobilisasi Tokoh Agama*

Sebagai partai yang lahir dari kultur Islam, upaya untuk memobilisasi tokoh agama dalam hal ini Kyai adalah salah satu cara meraih kesuksesan PKB dalam Pemilu. Menurut Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, salah satu strategi khusus yang dapat dilakukan dalam kampanye adalah salah satunya harus adanya penguatan kultur Kyai.<sup>47</sup> Maka dari itu, PKB sangatlah mengharapkan agar calegnya selalu berusaha untuk mendapat dukungan dari para Kyai. Hal itulah yang juga dilakukan oleh Agus Sulistiyono.

Agus Sulistiyono menyatakan kedekatannya terhadap para Kyai sangatlah berpengaruh terhadap perolehan suara pada Pemilu 2019. Menurutnya hal ini dikarenakan pengalaman organisasinya yang sudah lama terjalin di organisasi Ansor sejak 1983 hingga perjalanannya masuk PKB. Sehingga tidak heran apabila memiliki hubungan dekat dengan beberapa Kyai Nahdlatul Ulama. Untuk menjalin dan mempererat hubungan dengan para Kyai, Agus Sulistiyono lebih sering melakukan kunjungan ke pondok pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama di DIY.<sup>48</sup> Berdasarkan uraian di tersebut, upaya yang dilakukan Agus Sulistiyono dalam memobilisasi dukungan dari tokoh agama adalah dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke sejumlah pondok pesantren yang tersebar di wilayah DIY.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan terkait kekalahan Agus Sulistiyono sebagai caleg petahana pada Pemilu 2019 yang paling berpengaruh adalah dimensi bentuk kekuasaan terlihat (*visible power*) dan kekuasaan tersembunyi (*hidden power*). Dimensi bentuk kekuasaan terlihat (*visible power*) yang digunakan oleh Agus Sulistiyono yaitu dengan menggunakan strategi kampanye menyebar di seluruh DIY akan tetapi tidak terlalu fokus di Kabupaten Sleman. Padahal Kabupaten Sleman memiliki sebaran pemilih paling banyak di antara kabupaten-kota lain di DIY. Data dari KPU DIY menunjukkan bahwa dari 2.731.874 DPT yang tersebar di seluruh DIY, sebanyak 774.609 jumlah pemilih berada di Kabupaten Sleman.

---

<sup>47</sup>Solo Pos, "Cak Imin ajak Caleg PKB Perkuat Strategi" dalam *Solopos*, 2018.

<sup>48</sup>Agus Sulistiyono, Caleg Petahana Partai PKB, *wawancara*, 23 Desember 2020.

Strategi kampanye yang dilakukan tersebut menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kekalahan Agus Sulistiyono terhadap Sukamto. Strategi tersebut membuat Agus memperoleh suara yang rendah jika dibandingkan dengan Caleg lawan yang memperoleh suara tinggi di Kabupaten Sleman. Dari sebanyak 774.609 jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Sleman, Agus Sulistiyono hanya memperoleh suara sebanyak 15.117 sementara Sukamto memperoleh suara sebanyak 53.473. Sehingga walaupun Agus Sulistiyono memenangkan perolehan suara di 4 kabupaten/kota yang ada di DIY, namun kekalahan suara yang diperolehnya di Kabupaten Sleman mampu memukul mundur Agus Sulistiyono.

Faktor lain yang mempengaruhi kekalahan Agus Sulistiyono terdapat pada dimensi bentuk kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) dalam hal ini adalah praktik *money politic*. Praktik *money politic* yang dilakukan oleh Agus Sulistiyono masih kalah jika dibandingkan caleg lawan, Sukamto. Hal tersebut dibenarkan oleh Sunyoto sebagai Tim Sukses Agus Sulistiyono di Kecamatan Samigaluh bahwa caleg lawan melakukan praktik *money politic* berupa serangan fajar yang lebih besar nominalnya kepada pemilih di basis Agus Sulistiyono.

Dengan praktik serangan fajar yang lebih besar yang dilakukan oleh caleg lawan Agus Sulistiyono, dan dengan adanya pemilih bersifat pragmatis dan transaksional tentu sangat memengaruhi perolehan suara yang diperoleh Agus Sulistiyono. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Sunyoto sebagai Tim Sukses Agus Sulistiyono. Sehingga faktor *money politic* yang dilakukan oleh Agus Sulistiyono juga mempengaruhi kekalahan Agus Sulistiyono pada Pemilu 2019 di Dapil DIY.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Wahid. “Kegagalan Caleg petahana dalam Pemilu DPRD Jawa Tengah 2014” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2015), h. 110–115.
- Al-Hamdi, Ridho, Sakir, Suswanta, Muhammad Eko Atmojo & David Efendi (ed.), *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Batubara, Faisal & Asrinaldi. “Peran Tuan Syekh dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal” dalam *Jurnal Jispo*, Vol. 8 No. I (2018), h. 190–208.

- Boro, Veronika Ina Assan. “Pemasaran Politik Legislatif Petahana dalam Memenangkan Pemilu Anggota DPRD Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 (Kajian Strategi Politik dan Bauran Produk Politik)” dalam *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 2 (2010), h. 5-14.
- Chalik, Abdul . *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Chalik, Abdul. “Elite Lokal yang Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur” dalam *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, Vol. 23, No. 2 (2015), h. 363–381.
- CNN Indonesia. “Mahfud MD: KPU Sekarang Independent” dalam *CNN Indonesia*, 1 Februari 2019.
- Fadli, Andi Muh. Dzul, Indrawan Tobarasi & Komeyni Rusba. “Kemenangan Petahana dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau dari Perspektif Powercube” dalam *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 14, No. 2 (2018), h. 115-139.
- Fadli, Muhammad, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas & Achmad Zulfikar. “Keterlibatan Elite Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015” dalam *Aristo*, Vol. 6, No. 2 (2018), h. 301–328.
- Gunawan, Arry Bainus & Caroline Paskarina. “Strategi Koalisi Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah” dalam *Politea : Jurnal Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2020), h. 51-68.
- Halim, Abd. *Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube Modal dan Panggung*. Yogyakarta: LP2B, 2018.
- Hariyanto, Abdul Salam, Pawennari Hijjang, Heri Tahir & Tahir Kasnawi. “Socialization of Politics Incumbent (Case of West Sulawesi, 2011)” dalam *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, Vol. 23, No. 5 (2018), h. 27–33.
- Hartini, Desy. “KPU Pastikan Bersikap Independent dalam Mengurus Pemilu” dalam *Kompas*, 11 Maret 2019.
- Hertanto & Handi Mulyaningsih. “Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada di Lampung Timur Tahun 2015” dalam *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 16, No. 2 (2017), h. 100–118.
- Hidayat, Endik, Budi Prasetyo, & Setya Yuwana. “Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri” dalam *Jurnal Politik*, Vol 4, No. 1 (2018), h. 53–86.

- Jogja Inside. “8 politisi Jogja masuk Senayan Agus Sulistiyono tumbang” dalam *JogjaInside*, 4 Desember 2019.
- Khoiron & Ahmad Siboy. “Kemenangan Petahana (Incumbent) pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi Politik dan Marketing Politik” dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1 (2018), h. 1–10.
- KPU DIY. *Daftar Calon Tetap DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil DIY*. Yogyakarta : Komisi Pemilihan Umum DIY, 2019.
- KPU DIY. *Data Hasil Pemilu 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum DIY, 2014.
- KPU RI. *Pemilu 2009 Dalam Angka*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2010.
- Kriyantono, Rachmat, Moh Fajar Shodiq Ramadlan & Andi Setiawan. “Hidden Advertising in Local Election Era: Reducing The Public’s Right of Information and Critical Power of Media in Indonesia” dalam *International Journal of Development Research*, Vol. 05, Issue 10 (2015), h. 5830-5837.
- Kusmarni, Yani. *Studi Kasus*. Yogyakarta: UGM Jurnal Edu UGM Press, 2012.
- Nasir, Nurlatipah. “Kyai dan Islam dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya” dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No.2 (2015), h. 26–48.
- Putri, Masdiyan & Zuly Qodir. “Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015” dalam *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 4, No. 1 (2017), h. 142–173.
- Ratri, Indah Kartika, Amaliatulwalidain & Isabella, “Strategi Pemenangan Yan Anton Ferdian di Pilkada langsung Kabupaten Banyuasin 2013” dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 37–42.
- Solo Pos. “Cak Imin ajak Caleg PKB Perkuat Strategi” dalam *Solopos*, 2018.
- Yuliati, Retno, Soemarso Slamet Raharjo, Dodik Siswantoro. “Accountability and Incumbent Re-Election in Indonesian Local Government” dalam *International Research Journal of Business Studies*, Vol. 9, No. 3 (2017), h. 157–168.
- Yusra, Amri & Ikhsan Darmawan, “Kepentingan Petahana dalam Memanipulasi Pilkada Labuan Batu Selatan 2015” dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 74–87.
- Zakaria, Fernanda Putra Adela & Nurlela. “Hidden Power in The Choice of Head of Village in Simalungun District in 2017” dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries* (2019), h.

73–78.

**Wawancara**

Agus Sulistiyono, Caleg Petahana Partai PKB, *wawancara*, 23 Desember 2020.

Amir Nashiruddin, Komisioner Bawaslu DIY, *wawancara*, 23 Desember 2020.

Jumakir, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kabupaten, *wawancara*, 28 Desember 2020.

Noor Aan Muhlshoh, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Sleman, *wawancara*, 18 Februari 2021.

Sunyoto, Tim Sukses Agus Sulistiyono Tingkat Kecamatan, *wawancara*, 1 Januari 2021.